

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	ii
	iii
	iv
	i v
Lembar Pernyataan	vi
	xxii
	xxxv
	ixxxvii
	i xli
<i>Abstract</i>	xlii
Abstrak	1
	1
Ringkasan Disertasi	32
<i>Dissertation Summary</i>	32
	32
	33
Kata Pengantar	35
Daftar Isi	36
Daftar Tabel dan Daftar Gambar.....	47
<i>Glossarium</i>	53
	58
BAB I PENDAHULUAN	64
A. Latar Belakang Masalah	70
B. Rumusan Masalah	71
C. Tujuan Penelitian	78
D. Kegunaan Penelitian	80

E. Kerangka Konseptual	82
F. Kerangka Teori	82
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan	82
2. <i>Middle Range Theory</i> : Teori Negara Hukum	89
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Persamaan Di Hadapan Hukum	
4. <i>Applied Theory</i> : Teori Tujuan Hukum	100
5. <i>Applied Theory</i> : Teori Kewenangan	100
G. Kerangka Pemikiran	106
H. Metode Penelitian	107
I. Sistematika Penulisan	
J. Orisinalitas Penelitian	111
BAB II KAJIAN PUSTAKA	124
A. Lembaga Negara dan Negara Hukum Pancasila	
1. Lembaga Negara	128
2. Negara Hukum Pancasila	
B. Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap dan Asas Persamaan di Hadapan Hukum	131 135
1. Kekuasaan Kehakiman	137
2. Persamaan di Hadapan Hukum	
3. Hak Asasi Manusia	
C. Birokrasi Kebijakan Institusi Negara dan Asas Pemerintahan yang Baik	139 139
D. Ketentuan dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	143
1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945	
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	150
3. Pembentukan Peraturan Pemerintah	
4. Pembentukan Peraturan Menteri	169

BAB III	KEBIJAKAN INSTITUSI NEGARA TERKAIT PUTUSAN	172
	PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP	
A.	Penguasaan Tanah Negara oleh Kementerian Pertahanan/TNI.	172
B.	Hierarki dan Pendelegasian Peraturan Perundang-undangan Terkait Barang Milik Negara	174
C.	Peraturan Perundang-undangan Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Terkait Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap	177
D.	Ketidaktaatan Asas dan Ambiguitas Frasa Dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait Pengelolaan dan Penghapusan Barang Milik Negara	179
1.	Tumpang Tindih Undang-Undang Terkait Pengelolaan Barang Milik Negara	185
a.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	
b.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	191
c.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara	192
2.	Ketidaksesuaian Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014	198
3.	Ambiguitas Frasa Pengelola dan Pengguna Barang Milik Negara.....	200 203
4.	Refraksi Hukum dan Perubahan Terselubung Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah	208
5.	Ambiguitas Frasa Upaya Hukum Lainnya Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Menjadi Norma Baru Dalam Peraturan Menteri Keuangan	208 210
6.	Pembentukan Peraturan Menteri Keuangan Tanpa Dasar Pendelegasian Kewenangan Mengatur	214
7.	Pengucilan Hukum	214

8. Ambiguitas Frasa Tidak Mengganggu	216
9. Ambiguitas Frasa Sudah Tidak Berada Dalam Penguasaan	217
10. Peraturan Menteri Keuangan Merusak Sistem Peradilan...	
E. Perbandingan Sistem Hukum Dengan Negara Malaysia dan Belanda	220
1. Sistem Hukum Negara Malaysia	222
2. Sistem Hukum Negara Belanda	228
	229
	238
BAB IV PROSES HUKUM INSTITUSI NEGARA TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP	245
A. Proses Litigasi Perkara Tanah Milik Drs. Soemardjo	
1. Perkara Drs. Soemardjo Lawan Institusi Negara	254
a. Perkara Gugatan Tata Usaha Negara oleh Drs. Soemardjo...	
b. Perkara Gugatan Perdata oleh Drs. Soemardjo (Putusan <i>Declaratoir</i>)	
c. Perkara Gugatan Perdata oleh Drs. Soemardjo (Putusan <i>Condemnatoir</i>)	277
d. Perkara Gugatan Perdata oleh Menteri Keuangan	277
e. Perkara Perlawanan oleh Menteri Keuangan	
2. Eksekusi Tanah Milik Drs. Soemardjo	291
3. Berbagai Perkara Terkait Tanah Drs. Soemardjo	291
B. Proses Administrasi Institusi Negara Terkait Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap	294
C. Ketidakpatuhan Hukum Institusi Negara Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap.....	301
	301
	301
BAB V KONSTRUKSI IDEAL KEBIJAKAN INSTITUSI NEGARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP	302
A. Konstruksi Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terkait Penghapusan Barang Milik Negara	304
	324

B. Konstruksi Ideal Administrasi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap...	
1. Administrasi Pemerintahan	
2. Hukum Teladan	
 BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	
B. Saran	
C. Implikasi	
 DAFTAR PUSTAKA	
 RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu	43

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1. Kerangka Pemikiran	36

GLOSSARIUM

- 1) Konstruksi ideal adalah suatu konstruksi yang didambakan, yang terbaik, sebagai suatu teladan dalam hal kebijakan institusi negara terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- 2) Kebijakan adalah serangkaian tindakan strategis dalam suatu institusi negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan (*regels*), keputusan atau ketetapan (*beschikkings*), tindakan administrasi pemerintahan dan/atau diskresi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
- 3) Institusi negara adalah Kepresidenan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Tentara Nasional Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

- 4) Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata, yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.